KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 9 9 1			H.4 X	H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS I	PENERIMA PENGHASILA	AN YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : [1 5 9 9 7 1 8 0 3 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : RISCA EKA RAHAYU							
3. PPh PASAL	21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402-01	7.810.000	7.810.000	0	5	390.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor :	Nomor : Tanggal						
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :						_	
C.4 Tanggal :		0 8 dd 0 3 mm	2 0 2 2 <i>yyyy</i>				
C.5 Nama Penandatangan :		RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya men tandatangani secara			ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

UQTJBRA8